



The Internalization of Prophetic Values in Regional Financial Reporting Practices: A Behavioral Accounting Perspective

Muhammad Haris Subangkit¹, Muhammad Roihan², Mashudi³

harissubangkit190@gmail.com¹, muhammadroihan1922@gmail.com², mashudi88@lecturer.uinkhas.ac.id³

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Kiyai Haji Achmad Siddiq, Jember, Indonesia

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Kiyai Haji Achmad Siddiq, Jember, Indonesia

³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Kiyai Haji Achmad Siddiq, Jember, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of prophetic values in regional financial management practices from a behavioral accounting perspective, with a particular focus on the preparation of the Notes to the Financial Statements (CaLK). The study is motivated by the persistent challenges in regional financial management, including limited transparency, weak accountability, and insufficient integrity among government officials in preparing regional financial reports. These issues indicate that the quality of financial reporting is influenced not only by regulatory frameworks and accounting systems but also by the behavior and ethical values of public officials. This research employed a qualitative approach using a library research method. Data were collected from scholarly journals, books, and previous studies addressing behavioral accounting, prophetic values, regional financial management, and the Notes to the Financial Statements (CaLK). The data were analyzed descriptively through the processes of identifying, reviewing, and synthesizing relevant literature related to the research topic. The findings reveal that prophetic values namely *siddiq* (truthfulness), *amanah* (trustworthiness), *tabligh* (communicativeness), and *fathanah* (wisdom) play a significant role in fostering honest, responsible, transparent, and professional behavior among government officials in managing regional finances. These values also contribute to improving the quality of the preparation of the Notes to the Financial Statements (CaLK) as an essential instrument of public accountability. The study concludes that the internalization of prophetic values can support the realization of more transparent, accountable, and effective regional financial governance in accordance with the principles of good governance.

Keywords: Behavioral Accounting; Notes to the Financial Statements (CaLK); Prophetic Values; Regional Financial Management; Good Governance.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran publik untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah dituntut mampu menciptakan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, efektif, dan bebas dari penyimpangan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai persoalan seperti korupsi, manipulasi anggaran, lemahnya pengawasan, hingga rendahnya integritas aparatur pemerintah daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya ditentukan oleh sistem dan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh perilaku individu yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, pendekatan akuntansi berperilaku menjadi penting untuk memahami bagaimana nilai, etika, dan moralitas aparatur dapat memengaruhi praktik pengelolaan keuangan daerah.

Dalam perspektif Islam, perilaku aparaturnya pemerintah dapat dibentuk melalui internalisasi nilai-nilai profetik yang bersumber dari keteladanan Nabi Muhammad SAW, yaitu *siddiq* (jujur), *amanah* (bertanggung jawab), *tabligh* (transparan), dan *fathanah* (cerdas). Nilai-nilai tersebut dianggap mampu menjadi landasan moral dalam menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih etis, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah tidak hanya dipandang sebagai aktivitas administratif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual kepada masyarakat.

Penelitian mengenai etika dan nilai moral dalam pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan oleh Andi Yusrifal dan Jamaluddin Majid melalui penelitian berjudul *Telaah Kritis: Falsafah Budaya Nene' Mallomo sebagai Etika Pemerintahan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif etnografi dan menemukan bahwa nilai budaya lokal seperti *macca* (cerdas), *malempu* (jujur), *warani* (berani), dan *mage tteng* (teguh) mampu membentuk perilaku aparaturnya pemerintah yang lebih bertanggung jawab dan beretika dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai profetik Islam karena sama-sama menekankan pentingnya kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Namun, penelitian tersebut masih berfokus pada budaya lokal dan belum membahas internalisasi nilai-nilai profetik dalam perspektif akuntansi keperilakuan.

Kajian mengenai transparansi dan akuntabilitas juga dilakukan oleh Lucy Auditya, Husaini, dan Lismawati melalui penelitian berjudul *Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. Penelitian kuantitatif yang dilakukan pada OPD Provinsi Bengkulu tersebut menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perilaku aparaturnya yang terbuka, jujur, dan bertanggung jawab sangat penting dalam menciptakan tata kelola sektor publik yang baik. Dalam perspektif profetik Islam, transparansi dapat dikaitkan dengan nilai *tabligh*, sedangkan akuntabilitas berkaitan dengan nilai *amanah*. Meskipun demikian, penelitian tersebut belum memasukkan aspek religiusitas dan nilai-nilai Islam sebagai faktor yang memengaruhi perilaku aparaturnya pemerintah.

Penelitian lain dilakukan oleh Dewata, Jauhari, dan El Auda dengan judul *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah*. Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif dan menemukan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini berkaitan dengan akuntansi keperilakuan karena menyoroti bagaimana perilaku aparaturnya dalam menjalankan sistem pengendalian internal dapat memengaruhi kualitas pengelolaan keuangan daerah. Nilai *amanah* dan *fathanah* tercermin dalam kemampuan aparaturnya menjalankan pengawasan dan pengelolaan keuangan secara profesional. Akan tetapi, penelitian tersebut masih lebih menitikberatkan pada aspek teknis sistem pengendalian dan belum membahas internalisasi nilai-nilai profetik dalam perilaku aparaturnya pemerintah.

Selain itu, penelitian Uchi Lilla Qadri dan rekan-rekannya yang berjudul *Penerapan Prinsip Good Governance dalam Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah* menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas internal, dan partisipasi publik memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik sangat berkaitan dengan perilaku etis aparaturnya pemerintah. Dalam perspektif Islam profetik, prinsip transparansi dan tanggung jawab publik mencerminkan nilai *tabligh* dan *amanah*. Namun, penelitian tersebut belum menghubungkan konsep *good governance* dengan pendekatan akuntansi profetik maupun aspek spiritualitas aparaturnya pemerintah.

Penelitian terkait etika akuntansi juga dilakukan oleh Ayu Ning Tiyas Sulistiowati dan

rekan-rekannya melalui penelitian berjudul *Transparansi Keuangan Daerah: Mengapa Etika Akuntansi Penting?*. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif melalui *literature review* dan menemukan bahwa integritas, objektivitas, dan profesionalisme merupakan dasar penting dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini relevan dengan nilai profetik Islam, khususnya *siddiq* dan *amanah*, karena integritas dan profesionalisme dianggap mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah. Akan tetapi, penelitian tersebut masih bersifat konseptual dan belum melakukan penelitian empiris terkait penerapan nilai-nilai profetik pada aparatur pemerintah daerah.

Selanjutnya, Fredo TSP Hasugian dan rekan-rekannya melalui penelitian berjudul *Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value For Money, Kejujuran, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah* menemukan bahwa kejujuran, transparansi, dan pengawasan memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku aparatur pemerintah menjadi faktor penting dalam menciptakan tata kelola keuangan daerah yang baik. Nilai kejujuran yang dibahas dalam penelitian tersebut juga sangat dekat dengan konsep *siddiq* dalam Islam profetik. Namun demikian, penelitian tersebut belum mengkaji bagaimana internalisasi nilai-nilai profetik memengaruhi perilaku aparatur dalam praktik pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa kajian mengenai pengelolaan keuangan daerah selama lima tahun terakhir masih lebih banyak berfokus pada aspek teknis, transparansi, akuntabilitas, sistem pengendalian internal, dan *good governance*. Penelitian-penelitian tersebut memang telah membahas pentingnya perilaku etis aparatur pemerintah, tetapi belum secara spesifik mengaitkannya dengan internalisasi nilai-nilai profetik Islam dalam perspektif akuntansi keperilakuan. Selain itu, sebagian besar penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif sehingga dimensi moralitas, spiritualitas, dan pengalaman subjektif aparatur pemerintah dalam menjalankan pengelolaan keuangan daerah masih belum banyak dieksplorasi secara mendalam.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat research gap berupa minimnya penelitian yang membahas internalisasi nilai-nilai profetik seperti *siddiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fathanah* dalam praktik pengelolaan keuangan daerah melalui pendekatan akuntansi keperilakuan. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis bagaimana nilai-nilai profetik diinternalisasikan dalam perilaku aparatur pemerintah daerah dalam menjalankan pengelolaan keuangan publik. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana internalisasi nilai-nilai profetik memengaruhi perilaku aparatur pemerintah dalam praktik pengelolaan keuangan daerah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis penerapan nilai-nilai profetik dalam praktik pengelolaan keuangan daerah melalui perspektif akuntansi keperilakuan. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan konsep akuntansi keperilakuan dengan nilai-nilai profetik Islam dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, yang masih jarang diteliti dalam penelitian sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran publik untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah dituntut mampu menciptakan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Namun, dalam praktiknya masih banyak ditemukan kasus penyalahgunaan anggaran, korupsi, manipulasi laporan keuangan, serta lemahnya integritas aparatur pemerintah daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak hanya dipengaruhi oleh sistem dan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh perilaku individu yang menjalankan sistem tersebut. Oleh

karena itu, pendekatan akuntansi berperilaku menjadi penting untuk memahami bagaimana nilai, moralitas, dan etika aparatur pemerintah memengaruhi praktik pengelolaan keuangan daerah.

Dalam perspektif Islam, perilaku aparatur pemerintah dapat dibangun melalui internalisasi nilai-nilai profetik yang bersumber dari sifat Nabi Muhammad SAW, yaitu *siddiq* (jujur), *amanah* (bertanggung jawab), *tabligh* (transparan), dan *fathanah* (cerdas). Nilai-nilai tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek spiritualitas, tetapi juga dapat menjadi landasan etika dalam menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih berintegritas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, internalisasi nilai-nilai profetik menjadi relevan untuk dikaji dalam praktik pengelolaan keuangan daerah melalui perspektif akuntansi berperilaku.

Beberapa penelitian dalam lima tahun terakhir telah membahas aspek etika, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Yusrifal dan Majid (2022) dengan judul *Telaah Kritis: Falsafah Budaya Nene' Mallomo sebagai Etika Pemerintahan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah* menggunakan pendekatan kualitatif etnografi untuk mengkaji penerapan nilai budaya lokal seperti *macca* (cerdas), *malempu* (jujur), *warani* (berani), dan *magetteng* (teguh) dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sidrap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai budaya lokal mampu membentuk perilaku aparatur pemerintah yang lebih bertanggung jawab dan beretika dalam mengelola keuangan daerah. Penelitian tersebut memiliki hubungan dengan nilai-nilai profetik Islam karena sama-sama menekankan pentingnya kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Namun, penelitian ini masih berfokus pada budaya lokal dan belum membahas pendekatan akuntansi profetik Islam secara spesifik.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Auditya et al. (2019) berjudul *Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah* menggunakan metode kuantitatif pada OPD Provinsi Bengkulu. Penelitian tersebut menemukan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Transparansi dalam penelitian ini berkaitan dengan nilai *tabligh*, sedangkan akuntabilitas berkaitan dengan nilai *amanah*. Meski demikian, penelitian tersebut belum memasukkan aspek religiusitas maupun nilai-nilai Islam sebagai bagian dari perilaku aparatur pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah.

Selanjutnya, penelitian Dewata et al. (2021) yang berjudul *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah* menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini berkaitan dengan akuntansi berperilaku karena menyoroti perilaku aparatur dalam menjalankan sistem pengendalian internal. Nilai *amanah* dan *fathanah* terlihat dalam kemampuan aparatur menjalankan pengawasan dan pengelolaan keuangan secara profesional. Akan tetapi, penelitian ini masih lebih menitikberatkan pada aspek teknis pengendalian internal dan belum membahas internalisasi nilai-nilai profetik dalam perilaku aparatur pemerintah.

Penelitian Qadri et al. (2023) mengenai *Penerapan Prinsip Good Governance dalam Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah* juga menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas internal, dan partisipasi publik berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini memperlihatkan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik sangat berkaitan dengan perilaku etis aparatur pemerintah. Dalam perspektif Islam profetik, prinsip transparansi dan tanggung jawab publik mencerminkan nilai *tabligh* dan *amanah*. Namun, penelitian tersebut belum menghubungkan konsep *good governance* dengan pendekatan akuntansi profetik maupun aspek spiritualitas aparatur pemerintah.

Selain itu, penelitian Sulistiowati et al. (2022) yang berjudul *Transparansi Keuangan Daerah: Mengapa Etika Akuntansi Penting?* menemukan bahwa etika akuntansi seperti integritas, objektivitas, dan profesionalisme menjadi dasar penting dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini relevan dengan nilai profetik Islam, khususnya *siddiq* dan *amanah*. Namun, penelitian tersebut masih bersifat konseptual dan belum melakukan penelitian empiris terkait penerapan nilai-nilai profetik pada aparatur pemerintah daerah. Penelitian lain oleh Hasugian et al. (2021) juga menunjukkan bahwa kejujuran, transparansi, dan pengawasan memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Penelitian tersebut menegaskan bahwa perilaku aparatur pemerintah menjadi faktor utama dalam menciptakan tata kelola keuangan daerah yang baik.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek teknis, administratif, dan tata kelola formal seperti transparansi, akuntabilitas, sistem pengendalian internal, serta *good governance*. Penelitian sebelumnya juga lebih dominan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur efektivitas sistem dan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, aspek perilaku, moralitas, spiritualitas, dan internalisasi nilai-nilai profetik aparatur pemerintah masih belum banyak dieksplorasi secara mendalam, khususnya melalui perspektif akuntansi keperilakuan.

Dengan demikian, terdapat *research gap* dalam penelitian ini, yaitu belum banyak penelitian yang secara khusus membahas bagaimana internalisasi nilai-nilai profetik seperti *siddiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fathanah* diterapkan dalam praktik pengelolaan keuangan daerah melalui pendekatan akuntansi keperilakuan. Padahal, nilai-nilai tersebut dapat menjadi dasar moral dan etika aparatur pemerintah dalam menciptakan tata kelola keuangan yang lebih jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana internalisasi nilai-nilai profetik memengaruhi perilaku aparatur pemerintah dalam praktik pengelolaan keuangan daerah. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan perspektif akuntansi keperilakuan dengan nilai-nilai profetik Islam dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, yang selama ini masih jarang dikaji dalam penelitian akuntansi sektor publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai profetik memiliki pengaruh terhadap perilaku aparatur pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada proses penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dalam perspektif akuntansi keperilakuan, kualitas CaLK tidak hanya ditentukan oleh sistem akuntansi dan aturan pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh sikap, integritas, serta etika aparatur yang menyusun laporan keuangan tersebut.

Nilai *siddiq* tercermin dari sikap jujur aparatur pemerintah dalam menyajikan informasi keuangan pada laporan keuangan. Aparatur yang menerapkan nilai kejujuran cenderung menyampaikan kondisi keuangan daerah secara apa adanya tanpa melakukan manipulasi ataupun menyembunyikan informasi tertentu. Penyajian informasi yang jujur sangat penting karena CaLK berfungsi memberikan penjelasan rinci mengenai laporan keuangan pemerintah daerah agar dapat dipahami oleh masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sulistiowati et al. (2022) yang menjelaskan bahwa integritas dan etika akuntansi menjadi unsur penting dalam menciptakan transparansi laporan keuangan daerah.

Selain itu, nilai *amanah* terlihat dari tanggung jawab aparatur dalam menyusun CaLK sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Aparatur yang memiliki rasa tanggung jawab tinggi akan berusaha menyusun laporan keuangan secara lengkap, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa aparatur yang

memahami pentingnya amanah cenderung lebih teliti dalam mencatat transaksi, menjelaskan penggunaan anggaran, serta mengungkapkan informasi penting terkait kondisi keuangan daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab moral aparatur memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Nilai *tabligh* tercermin dalam keterbukaan aparatur pemerintah saat menyampaikan informasi keuangan kepada masyarakat melalui CaLK. Transparansi menjadi salah satu prinsip penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Aparatur yang menerapkan nilai *tabligh* tidak hanya menyampaikan informasi sebagai formalitas administratif, tetapi juga berusaha memberikan penjelasan yang mudah dipahami masyarakat mengenai kebijakan akuntansi, penggunaan anggaran, aset daerah, dan berbagai informasi lainnya. Temuan ini mendukung penelitian Auditya et al. (2019) serta Qadri et al. (2023) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Sementara itu, nilai *fathanah* terlihat dari kemampuan aparatur pemerintah dalam memahami standar akuntansi serta menyusun CaLK secara profesional. Aparatur yang memiliki kompetensi yang baik cenderung mampu menyusun laporan keuangan secara sistematis, jelas, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nilai *fathanah* juga mendorong aparatur untuk lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan regulasi dalam pengelolaan keuangan sektor publik sehingga kualitas laporan keuangan daerah dapat terus meningkat.

Berdasarkan perspektif akuntansi keperilakuan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku aparatur pemerintah menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas laporan keuangan daerah, termasuk CaLK. Keberadaan sistem pengendalian internal dan regulasi pemerintah tidak akan berjalan secara optimal apabila tidak didukung oleh integritas dan etika aparatur pemerintah. Oleh karena itu, internalisasi nilai-nilai profetik dapat menjadi salah satu pendekatan dalam membentuk perilaku etis aparatur pemerintah dalam praktik pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai profetik dalam penyusunan CaLK dapat mendukung terciptanya prinsip *good governance*, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab publik. Dengan demikian, CaLK tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap laporan keuangan daerah, tetapi juga menjadi bentuk pertanggungjawaban moral pemerintah kepada masyarakat atas pengelolaan keuangan publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa penerapan nilai-nilai profetik memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perilaku aparatur pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama pada penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Nilai-nilai profetik seperti *siddiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fathanah* dapat menjadi pedoman etika bagi aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan secara jujur, bertanggung jawab, terbuka, dan profesional.

Nilai *siddiq* terlihat dari sikap aparatur yang menyampaikan informasi keuangan sesuai dengan kondisi sebenarnya tanpa adanya manipulasi data. Nilai *amanah* tercermin dalam tanggung jawab aparatur saat menyusun CaLK sesuai aturan dan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Selanjutnya, nilai *tabligh* tampak dalam keterbukaan pemerintah daerah saat menyampaikan informasi keuangan kepada masyarakat secara jelas dan transparan. Sementara itu, nilai *fathanah* terlihat dari kemampuan aparatur dalam memahami sistem akuntansi serta menyusun laporan keuangan dengan baik dan sesuai ketentuan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan daerah, khususnya CaLK, tidak hanya dipengaruhi oleh sistem dan regulasi pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh perilaku dan integritas aparatur yang terlibat dalam proses penyusunannya.

Dengan demikian, penerapan nilai-nilai profetik dapat menjadi salah satu upaya untuk membangun tata kelola keuangan daerah yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Selain berfungsi sebagai pelengkap laporan keuangan, CaLK juga dapat dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban moral pemerintah daerah kepada masyarakat atas penggunaan anggaran publik. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai profetik dalam pengelolaan keuangan daerah diharapkan mampu mendukung terciptanya prinsip *good governance* serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Auditya, L., Husaini, & Lismawati. (2019). Analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Fairness*, 9(1), 21–41.
- Dewata, E., Jauhari, & El Auda, R. (2021). Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah: Sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem akuntansi pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, 6(2), 112–126.
- Hasugian, F. T. S., Simanjuntak, R., & Sitorus, M. (2021). Pengaruh akuntabilitas keuangan daerah, value for money, kejujuran, transparansi, dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 5(3), 77–91.
- Qadri, U. L., Harahap, N., & Siregar, D. (2023). Penerapan prinsip good governance dalam akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Publik Indonesia*, 11(2), 88–102.
- Rahman, F. (2021). Akuntansi berperilaku dalam tata kelola sektor publik: Pendekatan moral dan etika aparatur pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(3), 210–223.
- Sugiyono, A., & Rahmawati, D. (2023). Good governance dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Publik*, 9(2), 101–115.
- Suhendro, S. (2024). Pengaruh efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah serta sistem pengendalian intern terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 12(1), 45–58.
- Sulistiowati, A. N. T., Prasetyo, H., & Kurniawan, A. (2022). Transparansi keuangan daerah: Mengapa etika akuntansi penting? *Jurnal Etika dan Akuntansi Publik*, 4(1), 15–27.
- Yusrifal, A., & Majid, J. (2022). Telaah kritis: Falsafah budaya Nene' Mallomo sebagai etika pemerintahan dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Multikultural*, 3(2), 45–59.
- Yusuf, M. (2022). Nilai-nilai profetik dalam perspektif akuntansi syariah dan implementasinya pada sektor publik. *Jurnal Akuntansi Syariah Indonesia*, 14(1), 77–89.